

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Lingkungan yang bersih adalah harapan semua manusia karena dengan lingkungan yang bersih akan menciptakan tempat yang bebas dari kuman penyakit. Lingkungan bersih memberi banyak manfaat bagi kita karena lingkungan sangat berhubungan dengan manusia, dengan lingkungan yang bersih maka akan membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat dengan kondisi sehat manusia akan dapat melakukan segala jenis aktivitasnya tanpa hambatan termasuk dalam bekerja, belajar, bermain, berkumpul, bersosialisasi dan sebagainya namun, apabila lingkungan tempat tinggal kita menjadi kumuh dan kotor maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari.

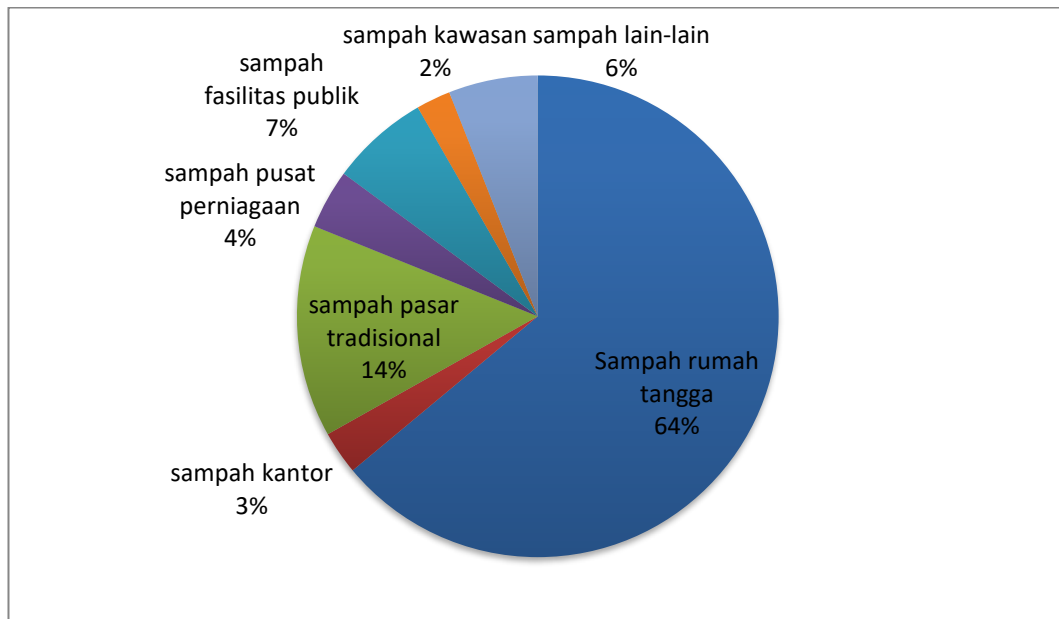
NKRI atau negara kesatuan republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 di dunia yaitu sejumlah 268.074.600 jiwa (BPS, 2020), dengan total wilayah seluas 1,905,000 km² (BPS, 2020). Tentunya tidak akan mudah lepas dari permasalahan lingkungan seperti masalah degradasi lahan, deforestasi hutan, polusi (udara,air,tanah), limbah, sampah,. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara ini permasalahan sampah lah yang menjadi isu hangat yang banyak disoroti oleh masyarakat Indonesia. Jumlah populasi penduduk yang besar maka produksi sampah negara ini juga besar

mencapai 65.200.000ton/tahun (Badan Pusat Statistik, 2018) dengan produksi sampah yang besar tentu dibutuhkan pengelolaan sampah yang mumpuni untuk dapat mengelola limbah buangan tersebut agar tidak menjadi pencemaran.

Badan Pusat Statistik (2018) memperkirakan jumlah populasi penduduk di Indonesia akan meningkat dari 23.713.544 jiwa menjadi total 284.829.000 jiwa pada tahun 2025 dengan pertambahan penduduk sebesar 9,08% dari tahun 2016 ke 2025. Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk tersebut maka, diperkirakan produksi sampah nasional meningkat sebesar 5.928.386 ton menjadi total 71.128.386 ton pada 2025 mendatang. Berdasarkan data tersebut hendaknya pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi melalui kebijakan-kebijakan atau program terkait lingkungan dan pengelolaan sampah yang tepat.

Kondisi yang terjadi pada kenyataannya fasilitas pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih kurang dan belum cukup mumpuni untuk dapat mengelola 65juta ton produksi sampah setiap tahunnya karenanya Indonesia akan menghadapi permasalahan timbunan sampah. Permasalahan kompleks yang dihadapi diantaranya terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah; terkait luas dan kapasitas TPA(Tempat Pembuangan Akhir), fasilitas angkut sampah, dan pencemaran lingkungan bahkan dapat berdampak ke kesehatan masyarakat. Terkait dengan produksi sampah Indonesia yang sedemikian besar maka berikut merupakan presentase jenis dan sumber sampah di Indonesia,

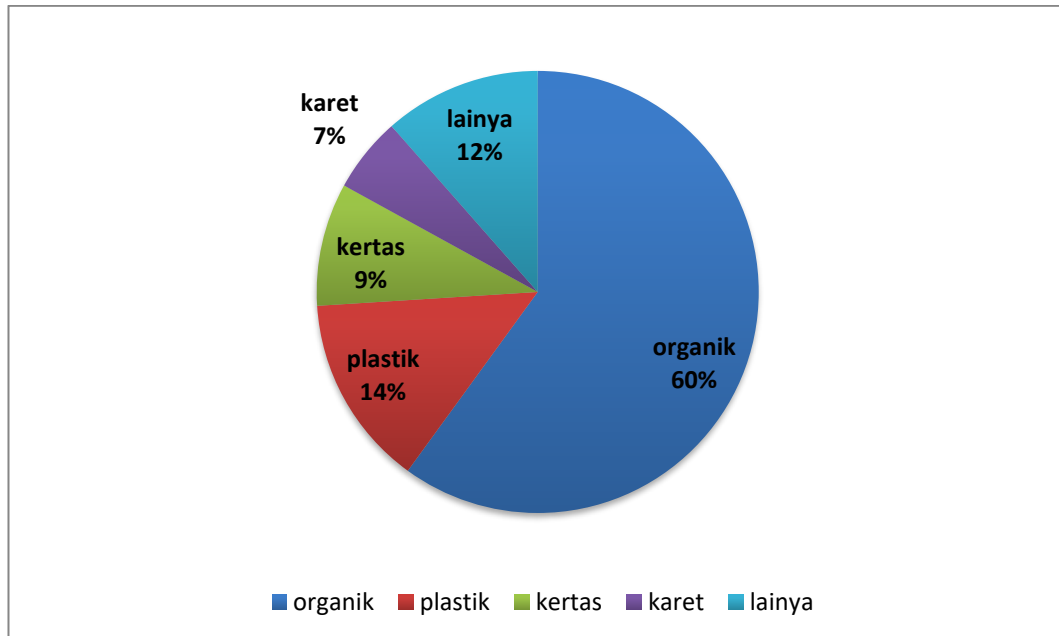
Gambar 1.1 Sumber sampah nasional



sumber:<https://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan data tersebut sumber terbesar dari produksi sampah nasional adalah bersumber dari sampah rumah tangga yang menyumbang presentase sebesar 64% dari total keseluruhan sumber sampah di Indonesia kemudian disusul oleh sampah pasar tradisional dengan presentase 14% dan kemudian sampah fasilitas publik sebesar 7% dari data tersebut artinya jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan sangat besar keluarga sebagai penyumbang utama dan bahwa sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 41.728.000 ton per tahun pada tahun 2018 dan disusul oleh sampah yang bersumber dari pasar tradisional sebanyak 9.128.000 ton per tahun. Guna menginterpretasikan data yang akurat maka diperlukan analisis yang spesifik terkait bermacam-macam jenis sampah yang diproduksi oleh rumah tangga, pasar tradisional, fasilitas publik, kawasan, sampah kantor, . Berikut analisa komposisi jenis sampah di Indonesia pada tahun 2018.

Gambar 1.2 Komposisi jenis sampah di Indonesia



sumber:<https://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan data tersebut komposisi jenis sampah yang dihasilkan berupa sampah organik dengan presentase sangat mendominasi sebesar 60% , kemudian disusul oleh sampah plastik 14%, sampah kertas 9%, sampah karet 7%, dan sampah lainnya (yang terdiri dari logam, kaca dan kain) sebesar 12%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sampah organik dari hasil sisa sampah rumah tangga yang dihasilkan cukup tinggi dengan jumlah mencapai 39.120.000 ton per tahun pada 2018.

Sebagian besar produksi sampah nasional yang dihasilkan dari SRT (Sampah Rumah Tangga) berupa sampah organik apabila sampah ini tidak dikelola dengan cara dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya secara tepat pada akhirnya terbengkalai maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap serta

pencemaran lingkungan yang cukup berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Mengacu pada data sumber sampah rumah tangga(SRT) adalah yang paling mendominasi secara kumulatif produksi sampah di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan strategi pengelolaan sampah nasional yang tercantum pada Peraturan (Pemerintah RI No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012 cara penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut Pasal 10 ayat 1 meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah menurut pasal 11 meliputi a)pembatasan timbunan sampah, b)pendaur ulang sampah dan c) pemanfaatan kembali sampah. Adapun penanganan sampah menurut pasal 16 meliputi kegiatan, a)pemilahan, b)pengumpulan, c)pengangkutan, d)pengolahan dan e)pemrosesan akhir sampah.

Pemerintah harus lebih fokus kepada pengelolaan sampah rumah tangga (SRT). Kegiatan pemilahan merupakan salahsatu cara untuk menangani dan dapat mengurangi permasalahan timbunan sampah akibat timbunan sampah yang selaras dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Total produksi sampah diperkirakan sebanyak 71.128.386 ton pada tahun 2025 mendatang maka dari itu dengan pengelolaan sampah dengan tepat menjadi kunci utama dalam mencegah timbulnya permasalahan tumpukan sampah.

Perlu diketahui bahwa tindakan rumah tangga terhadap sampah yang dihasilkan sebanyak 66,8% adalah membakar sampah, mendaur ulang hanya 1,2% dan tindakan lainnya sebanyak 32% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018)tindakan pembakaran sampah berpotensi menimbulkan gas buangan yang dapat mencemari lingkungan, usaha daur ulang sangat kecil hanya 1,2% saja, seharusnya disini peran pemerintah untuk mendorong rumah tangga melakukan langkah daur

ulang ataupun pengelolaan yang lain dengan cara yang tepat agar tidak mengakibatkan permasalahan lingkungan lainnya.

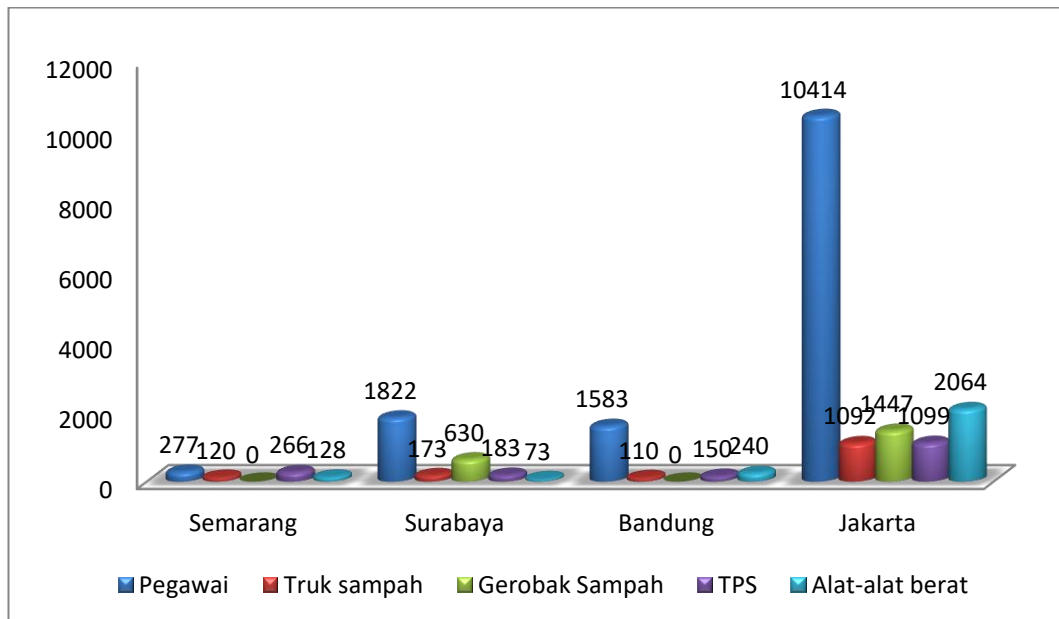
Fakta tersebut membuat kita sadar bahwa permasalahan sampah menimbulkan dampak negatif apabila tidak ditangani dengan tepat. Apasaja usaha yang telah diusahakan oleh pemerintah dalam tujuan mengatasi hal tersebut dan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak. Jika kita tilik 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau jawa dengan jumlah populasi mencapai 145 juta jiwa persebaran penduduk yang sangat terkonsentrasi di pulau Jawa inilah yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana peran *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di jawa khususnya Jawa Tengah dengan luas 28,94% dari luas pulau jawa dan sebagai provinsi yang berada di tengah pulau jawa memiliki 35 juta penduduk mayoritas suku jawa dengan konsentrasi persebaran di pusat-pusat kota.

Pada tahun 2018 menurut data Badan Pusat Statistik(2018) setidaknya terdapat 594 kawasan pemukiman kumuh di Jawa Tengah. Pemukiman yang kumuh tercipta dari tingkat kepadatan penduduk, tingkat ekonomi, budaya hidup masyarakat, dan dipengaruhi oleh sistem pengelolaan sampahnya. Pada 2017 terdapat 924.962 jumlah kasus diare dan 7400 kasus DBD, penyakit-penyakit tersebut dapat disebabkan karena sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kotor dan sebagian dari kasus penyakit akibat dari masalah lingkungan berpusat di ibukota provinsi Jawa Tengah yaitu kota Semarang.

Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa tengah termasuk dalam kota metropolitan seluas 373km² terletak di utara pulau jawa dengan jumlah populasi

sebesar 1.555.984 jiwa (pada tahun 2018) dan tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan (BPS, 2020). Berdasarkan semboyan kota ATLAS : aman tertib, lancar, asri dan sehat pemerintah kota Semarang berusaha mewujudkan lingkungan yang bersih bebas sampah. Timbunan sampah mencapai 1270Ton/hari akan tetapi dari jumlah tersebut yang dapat dikelola di TPA Jatibarang hanya 850Ton/hari ternyata terdapat 420Ton sampah yang tidak dapat terkelola setiap harinya serta cakupan daerah pelayanan sampah hanya 72% dari luas wilayah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), 2017-2018). Berdasarkan data tersebut ternyata masih banyak sampah yang belum dapat dikelola secara maksimal oleh Pemkot Semarang berpotensi menimbulkan timbunan sampah. Berikut adalah data jumlah sarana pengelolaan sampah Dinas Kebersihan kota Semarang,

Gambar 1.3 Sarana dinas kebersihan



sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id>

Menurut data diatas diketahui bahwa sarana dinas kebersihan yang dimiliki kota Semarang sangat berbeda jauh dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh kota lainnya yang ada di pulau Jawa seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Dari sisi pegawai dinas kebersihan di kota Semarang hanya memiliki 277 pegawai berbeda jauh dengan Surabaya, Bandung yang masing-masing memiliki >1500 pegawai kebersihan bahkan Jakarta memiliki lebih dari 10.000 pegawai, kemudian ditinjau dari jumlah gerobak sampah dan truk sampah Semarang hanya memiliki 120 truk pengangkut sampah dan tidak memiliki gerobak sampah sangat berbeda dengan Surabaya yang memiliki 630 gerobak sampah dan 173 truk sampah.

Terbatasnya fasilitas kebersihan yang dimiliki oleh pemerintah kota Semarang tentu menjadi salahsatu faktor penghambat visi kota `ATLAS` yaitu

kota bersih dan sehat, tumpukan sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga bercampur dengan berbagai macam sampah lainnya jika terlalu lama dibiarkan menumpuk maka akan menyebabkan sampah membusuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap dan berpotensi menjadi pemicu wabah penyakit apabila dibiarkan begitu saja.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah kota adalah dengan menerapkan program pilah sampah di kota Semarang, dengan harapan bahwa dominasi sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat tidak semuanya kemudian di buang tidak termanfaatkan dan hanya akan menjadi sampah saja tetapi pemerintah berusaha mendorong masyarakat agar mau memilah sampah yang masih layak atau sampah barang-barang yang sekiranya masih memiliki nilai guna yang nantinya akan di daur ulang menjadi produk bernilai yang ramah lingkungan dan ekonomis.

Melalui program pilah sampah diharapkan sampah-sampah yang nantinya diangkut oleh truk sampah Dinas Kebersihan untuk dibawa ke TPA biasanya adalah barang buangan yang sudah tidak terdapat nilai gunanya sehingga jumlah timbunan sampah di TPA nantinya akan menurun seiring dengan berjalanya program tersebut. Diperlukan juga peran aktif dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, berikut ini tabel *stakeholder* yang terlibat dalam program tersebut beserta perannya:

Tabel 1.1 Peran *stakeholders* program pilah sampah

No	Stakeholder	Peran	Sumber
1.	Pemerintah kota Semarang	a) Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai kriteria, standar, prosedur dan norma yang ditetapkan. b) Pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain. c) Menyediakan sarana pemilahan sampah berupa TPS, TPST dan TPS 3R di wilayah pemukiman sesuai standar.	Pasal 17 dan 18 (Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012, 2018)
2.	Dinas kebersihan dan pertamanan kota Semarang	a) Merumuskan kebijakan bidang teknis operasional, sarana dan prasarana. b) Penyusunan rencana program. c) Pelaksanaan, bimbingan, penyuluhan dan kordinasi program. d) Pelayanan umum bidang kebersihan.	(Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan kota Semarang)
3.	Lembaga pengelola sampah Kecamatan	a) Pengkordinasian dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah pada tingkat kelurahan. b) Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke DKP / Dinas kebersihan dan pertamanan kota.	Pasal 36 (Peraturan daerah kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah)
4.	Lembaga pengelola sampah tingkat	a) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat RW dan RT b) Pengusulan kepada camat terkait	

	kelurahan	kebutuhan TPS dan TPST.	
5.	Masyarakat	<p>Peran dalam operasionalisasi pengelolaan sampah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan wadah sampah b) Pemilahan sampah rumah tangga c) Fasilitas alat angkut ke TPS/TPST d) Menjaga kebersihan lingkungan sekitar <p>Peran penegakan perturan yang berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tertib Menaati peraturan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku b) Jika melanggar mendapat teguran/peringatan bahkan pencabutan izin <p>Peran dalam kelembagaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berperan dalam kelompok swadaya masyarakat(KSM) b) Berperan dalam Bank sampah 	<p>pasal 9 dan pasal 54 (Peraturan daerah kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah)</p>
6	Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan sampah b) Mendirikan rumah pendidikan sampah bagi anak-anak dan ibu-ibu 	<p>Website official komunitas Seangle Semarang https://seangle.org</p>

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap *stakeholder* memiliki peranan masing-masing dalam upaya pengelolaan sampah. Mulai dari pemkot yang bertugas menyediakan sarana pra sarana kelola sampah, hingga membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang kemudian

diturunkan kedalam DKP kota Semarang (Dinas kebersihan dan pertamanan) dalam rangka perumusan kebijakan operasional dan teknis pelaksanaan serta melakukan pembinaan dan koordinasi ke tingkat kecamatan. Kecamatan kemudian mengkoordinasikan program ke tingkat kelurahan, lurah kemudian mengkoordinasikan ke tingkat RW dan RT hingga akhirnya diteruskan kepada masyarakat untuk pelaksanaan program tersebut.

Kelurahan di kota Semarang yang telah melaksanakan program Pilah Sampah adalah kelurahan Mangkang Kulon. Kelurahan seluas 399.819 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.682 jiwa dengan jumlah 6 RW dan 21 RT (Website Kecamatan Tugu, 2018). Sejak tahun 2018 kelurahan Mangkang Kulon ditunjuk oleh pemerintah kota Semarang sebagai Kampung Tematik Pilah Sampah. Program yang diresmikan pada tanggal 25 Juni 2018 dibarengi dengan pendirian Bank sampah. Bank sampah tersebut sebagai tempat untuk menampung sampah-sampah yang dikumpulkan masyarakat dan nantinya akan di pilah sebelum di olah menjadi produk yang bernilai ekonomis atau sebagian dibuang.

Program tersebut diperlukan guna mengatasi permasalahan timbunan sampah yang tak terangkut dan sering menumpuk sehingga mengakibatkan timbulnya bau busuk karena sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga di Mangkang kulon adalah sampah organik serta permasalahan mengenai bencana banjir yang sering terjadi akibat permasalahan sampah di kelurahan mangkang kulon. Harapan pemerintah dari program pilah sampah adalah dapat mengurangi timbunan sampah, pembusukan yang menimbulkan bau tak sedap, mengurangi

lingkungan kumuh dan dapat menjadi sumber pemasukan bernilai ekonomis dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana program.

Permasalahan sampah selain itu juga dapat berdampak pada timbulnya potensi bencana alam. Kelurahan Mangkang Kulon merupakan salah satu daerah yang seringkali dilanda oleh bencana banjir. Banjir yang sangat mengganggu aktifitas warga dan berdampak buruk pada gagal panen akibat banjir yang merendam area persawahan warga, merendam area tambak dan dapat merusak bangunan juga. Menurut (DPU Kota Semarang, 2018) Banjir sendiri bisa di akibatkan oleh beberapa hal, seperti:

- Curah hujan tinggi

Derasnya/ turunnya hujan dengan lebat akan mengakibatkan daerah menjadi banjir selain itu curah hujan tinggi dapat menyebabkan sungai-sungai tidak mampu menampung volume air yang melampaui kapasitas.

- Membuang sampah sembarangan

Sampah yang dibuang sembarangan juga bisa mengakibatkan banjir, sampah-sampah yang berserakan di jalan otomatis akan terbang terbawa angin dan bisa masuk kedalam selokan, sampah didalam selokan yang menumpuk akan menyebabkan tersumbatnya jalan pengairan sehingga menyebabkan banjir.

- Saluran air yang tersumbat

Jika saluran tersumbat dan tidak ada saluran air yang cukup untuk menampung debit air maka pada saat hujan turun dengan lebatnya, maka air tidak bisa dengan mudahnya diserap oleh tanah sehingga menyebabkan banjir.

- Pendirian rumah di sepanjang sungai

Masyarakat yang mendirikan rumah di pinggir cenderung akan mengurangi lebar sungai sehingga mengakibatkan air mengalir dengan tidak optimal.

Permasalahan wilayah yang masih sering dijumpai yaitu tumpukan sampah dan wilayah yang cukup kumuh selain itu bencana banjir yang juga terjadi karena sampah. Banjir bukan hanya datang saat curah hujan tinggi melainkan juga akibat ulah manusia sendiri. Peristiwa banjir di kelurahan Mangkang memang menjadi peristiwa yang sudah sering didengar oleh masyarakat kota Semarang dan sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa apabila terjadi hujan wilayah ini sering dilanda oleh banjir. Persoalan sampah juga menjadi salah satu faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya banjir dan tentu saja ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di kelurahan Mangkang kulon.

Persoalan sampah di kelurahan Mangkang kulon tentu menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah setempat saja dan pasti ada beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Mangkang kulon, bagaimana peran dari para pengelola sampah sehingga bencana banjir masih

sering melanda wilayah ini dan perlu menjadi perhatian bahwa permasalahan yang terjadi tentu dapat dikatakan bahwa setiap *stakeholder* pasti memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing di dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon sehingga timbulah pertanyaan “**Mengapa peran *stakeholder* program pilah sampah belum maksimal ?**”

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana peran *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang ?
- 1.2.2 Apa Sajakah Faktor Penghambat bagi *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang ?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Menganalisis peran *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang.
- 1.3.2 Menganalisis Faktor Penghambat bagi *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang.

1.4 Kegunaan penelitian

- 1.4.1 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan tentang peran *Stakeholders* program pilah sampah dan terkait permasalahan lingkungan diperkotaan.
- 1.4.2 Secara Praktis kegunaan dari penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan pengetahuan peneliti dan menjadi masukan informasi bagi pihaklainnya mengenai peran *Stakeholders* program pilah sampah.
- 1.4.3 Secara akademis berguna sebagai bahan kajian, pembelajaran dan refrensi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif mengenai peran stakeholder dan lingkungan bagi para akademisi di universitas.

1.4.4 Bagi Pemerintah berguna sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan maupun program mengenai lingkungan khususnya persampahan.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah sistem yang memuat kumpulan konsep teori-teori abstrak dari para tokoh-tokoh sebagai sebuah konsep-konsep atau model-model terkait dengan suatu fenomena yang berfungsi untuk membantu peneliti di dalam proses mempelajari dan memahami suatu fenomena tertentu. Kerangka teori berperan sebagai landasan paling dasar untuk membimbing seorang peneliti melalui kerangka konseptual di dalam menemukan jawaban atas sebuah fenomena secara sistematis dan bertanggungjawab.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Jurnal Penelitian terdahulu

No	Judul Artikel	Nama Pengarang	Tujuan Penelitian
1	Analisis kebijakan Bank Sampah di Kota Makkasar (2016)	M. Marwan Tasdir (Prodi Ilmu Pemerintahan,	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bank sampah di kota Makkasar apakah sudah terlaksana dengan baik

		Fisip, Universitas Hassanudin)	serta seberapa efisien dan efektif dari pelaksanaan kebijakan, bagaimana partisipasi masyarakat sasaran kebijakan dan dampak yang terjadi terhadap pengelolaan sampah di kota Makkasar.
2	Peran Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Pola Pilah Sampah Kumpul Olah Terhadap Reduksi Sampah kota (2012)	Sri Darwati dan Fitriani Aangraeni (Pusat Litbang pemukiman, Badan Litbang, Kementerian PU, Bandung)	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran dari komunitas dan masyarakat di dalam usaha untuk mengurangi reduksi sampah di kota Probolinggo, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana perilaku masyarakat dapat mempengaruhi perubahan lingkungan yang ada kota Probolinggo menggunakan pendekatan partisipatif antara masyarakat, komunitas dan pemerintah setempat.
3	Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kelurahan	Ghana Abdilla Hekmatiar, Kismartini, R.	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui <i>stakeholders</i> yang terlibat didalam

	Ramah Lingkungan Di Kecamatan Banyumanik (2016)	Slamet Santoso (Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang)	implementasi program kelurahan ramah lingkungan di kecamatan Banyumanik kemudian melakukan analisis peran dari setiap <i>stakeholders</i> yang terlibat di dalam program tersebut serta untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut
4	Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasi Dalam Pembangunan Pertanian (2007)	Muhammad Iqbal (Pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Bogor)	Penelitian ini berusaha untuk menilik para pemangku kepentingan yang sebenarnya memiliki peran di dalam usaha pembangunan pertanian tetapi kurang mendapatkan perhatian karena posisi strata yang rendah. Penelitian ini berusaha mengungkap peran pemangku kepentingan kemudian melakukan klasifikas atas partisipasi, fasilitas, dan sinergisitas mereka antara satu dengan yang lainnya.
5	Analisis Pengelolaan	Cahyo	Penelitian yang dilakukan oleh

	Sampah terpadu Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang (2012)	Suryaningsih dan Ledstari (Departement Administrasi publik, FISIP, Universitas Diponegoro)	mahasiswa administrasi publik Universitas Diponegoro tersebut adalah untuk dapat mengetahui kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, bagaimana kondisi dan situasinya, mencoba mencari tahu efektivitas dan efisiensi dari program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di kota Semarang serta berusaha untuk mengetahui faktor-faktor penghambat program dalam rangka menyusun sebuah strategi yang tepat untuk memberi advice bagi pemerintah kota terkait pengelolaan sampah terpadu yang benar agar dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan demi terwujudnya harapan bersama.
6	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu (2014)	Talib(Mahasiswa prodi Magister Administrasi	Peneliti berusaha mencari tahu kondisi pengelolaan sampah di kota Palu dan berusaha mengumpulkan

		Publik, FISIP Pasca Sarjana, Universitas Tadulako	data-data dan fakta terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Palu faktor apasaja yang mendukung keberjalanan program terseut serta faktor apasaja yang menghambat implementasi program tersebut. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi pemerintah kota Palu agar melakukan pembenahan dan perbaiki terkait proses implemementasi kebijakan sampah di Palu agar lebih baik lagi.
7	Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Semarang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (2017)	Indira Febriyanti, Dra. Margaretha Suryaningsih, M.S.(Departemen Administrasi Publik, FISIP, Undip, Semarang)	Berdasarkan hasil analisis pada jurnal tersebut membahas terkait implementasi kebijakan penanganan sampah dikota Semarang yang mengacu pada Perda kota Semarang No 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Berisi identifikasi permasalahan, faktor-fator yang mempengaruhi implementasi

			<p>program secara positif dan negatif dengan tujuan implementasi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.</p>
8	<p>Application Of Analytical Hierarchy Processed To Analyze Stakeholders Preferences For Municipal Solid Waste Management Plans In Boston USA (2008)</p>	<p>Francisco Contreas, Keisuke Hanaki, Stephen Connors, Toshiya Aramaki (Departement of Urban Eingenering, University of Tokyo)</p>	<p>Dari jurnal internasional tersebut berbicara mengenai analisis proses hirarkhi terhadap alternatif stakeholder dalam rangka menciptakan rencana sistem manajemen sampah terpadu di Boston, USA.</p> <p>Peneliti menganalisis hirarkhi proses dari sistem pengelolaan sampah terpadu di kota Boston kemudian melihat kondisi pelaksanaan program tersebut secara keseluruhan, mengidentifikasi faktor yang berpengaruh secara positif maupun negatif kemudian menentukan alternatif kebijakan pada stakeholders terkait untuk dilakukan pengembangan dan pembinaan.</p>

Beberapa penelitian diatas menjadi bahan pembelajaran dan refrensi bagi peneliti agar dapat memahami bahwa usaha di dalam implementasi kebijakan pengelolaan atau penanganan sampah seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah saja sebagai pembuat kebijakan namun juga harus dipandang dari berbagai sudut pandang lain. Sudut pandang masyarakat, sudut pandang komunitas sampah, sudut pandang individu pegiat lingkungan sudut pandang swasta dan lain sebagainya. Dengan memahami berbagai sudut pandang kita menjadi mengetahui kepentingan dan peran dari masing-masing *Stakeholder* yang terlibat di dalam kaitanya pengelolaan sampah di luar negeri dan di Indonesia.

Artikel atau jurnal-jurnal penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa usaha dalam mengelola sampah pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri sekalipun masih dalam tahap formulasi kebijakan pun pemerintah juga perlu untuk mendengar aspirasi dan suara masyarakat karena merekalah yang mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di sekitar lingkungan mereka dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat baik berdampak besarmaupun kecil.

Informasi yang peneliti dapatkan dari membaca jurnal-jurnal tersebut adalah bahwa di Indonesia banyak kondisi yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih kurang berhasil dan mengalami hambatan yaitu dikarenakan masyarakat disini masih kurang dilibatkan di dalam usaha pengelolaan sampah di lingkungan sekitar mereka, mereka hanya dijadikan

sebagai subjek pelaksana level terendah sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberikan saran atau aspirasi kepada pemerintah sehingga banyak dari masyarakat yang erasa malas untuk ikut terlibat dalam program-program sampah yang diinisiasi oleh pemerintah.

Tingkat partisipasi yang rendah ini tidak lepas dari pendekatan pemangku kepentingan yang kurang lancar, apabila pemerintah bekerja dengan mengajak masyarakat melalui kelompok-kelompok kecil ini kemudian mencoba menganalisis dan memaksimalkan peran masing-masing dari mereka tentunya permasalahan dan hambatan yang terjadi akan diselesaikan secara bersama-sama dan membuat usaha pelaksanaan program semakin besar tingkat keberhasilannya. Peneliti kemudian mengambil kesimpulan bahwa diperlukan pendekatan partisipatif kepada *stakeholders* terkait, menganalisis peran masing-masing kelompok dan memaksimalkan peran mereka serta memberi ruang bagi mereka untuk bisa berpendapat secara bebas, memberi usulan saran dan yang terakhir adalah dipelukkan komunikasi yang baik antar *Stakeholder* agar pelaksanaan program dapat memenuhi harapan semua pihak terkait.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses peng-organisasi-an sumber-sumber daya yang ada sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi baik di tingkat low, middle, maupun top dapat dikerjakan dengan baik, kegiatan administrasi merupakan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, jadi pada dasarnya administrasi

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dengan cara kerjasama kelompok dalam sebuah organisasi demi mencapai tujuan organisasi dengan cara pemanfaatan dan mengelola sumber daya organisasi yang dimiliki.

Terdapat 3 cara pandang yang digunakan untuk menganalisis istilah administrasi. Yang pertama administrasi sebagai proses atau kegiatan menurut *Sondang P. Siagian* dalam (Ali Mufiz, 2014) Administrasi merupakan,

“Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan pendapat tokoh lain yaitu menurut *Soetarto* administrasi merupakan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa manusia yang berproses dalam mencapai sebuah tujuan tertentu.

Kedua administrasi dipandang sebagai suatu tata usaha. Menurut *Muwanardi* administrasi dipandang sebagai tata usaha karena kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang terorganisir secara rapi dan sistematis berkaitan dengan berbagai fakta-fakta yang berhuna untuk menentukan pandangan akan sebuah hubungan timbak balik / feedback dengan fakta-fakta yang lainnya , pendapat lainya diungkapkan oleh *Harris Muda* administrasi sebagai tata usaha merupakan kumpulan aktivitas menulis, mencatat, dan termasuk kegiatan pembukuan yaitu mencatat perubahan yang terjadi pada suatu perusahaan tertentu serta berkaitan pula dengan aktivitas surat-menyurat (Ali Mufiz, 2014).

Ketiga administrasi dipandang sebagai administrasi publik menurut Wayong merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan cara melakukan pengendalian dan kontrol organisasi atau instansi pemerintah yang ada di dalamnya, menurut tokoh lainya administrasi publik dipandang melalui sudut struktural dari mulai organ yang tinggi menengah hingga rendah yang memiliki fungsi masing-masing untuk melakukan pengaturan agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat tetap berjalan.

Menurut Phrestus dalam (Ali Mufiz, 2014) Administrasi adalah ilmu dan seni yang artinya adalah administrasi di dalamnya memuat konsep-konsep atau teori dari berbagai tokoh sebagai suatu ilmu yang berguna untuk kehidupan dan administrasi merupakan seni yang dapat terus berkembang sesuai dengan pengalaman dan pembejaran seseorang di dalam melakukan kegiatan administrasi dapat berubah dan berkembang ke arah yang positif terus memperbaharui diri tidak terbatas oleh suatu batasan.

Setetelah banyak memahami konsep dari administrai marilah kita mulai memahami konsep dari publik. Kata *public* berasal dari bahasa inggris apabila diterjemahkan berarti umum, masyarakat, rakyat, dan khalayak, kata *public* dalam bahasa inggris merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa latin yaitu for *populicus* atau *populicus* atau *populus* yang kemudian diterjemahkan menjadi kata *People* atau dalam bahasa indonesia adalah masyarakat, rakyat, bangsa . Jika disimpulkan adminsitrase publik berarti sebuah ilmu yang mempelajari serangkaian usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih menggunakan

pendekatan proses, tata usaha, maupun pemerintah dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai demi kepentingan masyarakat umum.

Didalam administrasi publik terdapat beberapa paradigma-paradigma yang telah terjadi pada masa kemasa sebagai sebuah bentuk perkembangan ilmu administrasi publik yang ada di masyarakat. Terdapat paradigma administrasi sebagai dikotomi politik, Prinsip – prinsip administrasi, administrasi negara sebagai politik, administrasi negara sebagai ilmu administrasi, administrasi negara sebagai administrasi negara, dan paradigma good governance.

a. Paradigma I Administrasi negara sebagai dikotomi politik(1900-1926)

Paradigma ini bersumber dari buku karangan *Leonard D. White dan Frank J. Goodnow* didalam buku karanganya mereka berdua berpendapat bahwa administrasi harus memfokuskan diri pada pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Lembaga legislatif dan yudikatif, mereka mengatakan bahwa fungsi dari kedua lembaga tersebut adalah membuat aturan-aturan politik bersumber dari tujuan utama negara yang telah mereka buat sehingga nantinya dirumuskan dan disahkan oleh lembaga legislatif kemudian dibantu oleh yudikatif dalam mengintrepetasiakanya lalu lembaga eksekutif harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dibuat.

Didalam pendapat tersebut seakan-akan administrasi publik hanya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan dan politik yaitu legislatif dan yudikatif sedangkan eksekutif bertindak melaksanakan saja. Salahsatu tokoh lainnya yang menganut paradigma ini adalah Dwight Waldo menurutnya

paradigma ini hanya berfokus pada politik saja dan mengabaikan teori manajemen dan administrasi sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma ini sangat `bebas nilai` yang berarti tidak ada kaitan atau terkait dengan nilai-nilai tertentu dan hanya fokus pada dirinya sendiri. Serta paradigma ini terlalu menonjolkan sisi lokus nya yaitu pemerintahan tetapi kurang mendalami fokus atau tata cara manajemen dan pemerintahan.

b. Paradigma II Prinsip – prinsip administrasi (1927-1937)

Setelah berakhirnya periode paradigma sebagai sebuah dikotomi politik kemudian di tahun 1927 muncul paradigma baru yaitu prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh yang menganut paradigma ini diantaranya adalah Henry Fayol, Mary P. Follet, Alan Reiley, James D. Mooney, dan W.F. Willoughby yang menulis buku berjudul *Public Administration* di dalam karangannya buku tersebut banyak membahas seputar prinsip-prinsip administrasi, ilmu manajerial dan seputar ilmu kepegawaian.

Didalam administrasi ini manajemen sumberdaya atau kepegawaian dibahas secara menyeluruh termasuk organisasi dari level terendah hingga organ tingkat atas di dalam ilmu tersebut tidak terbatas pada lokus atau tempat dimana administrasi itu dapat diterapkan paradigma ini fokus pada sistem dan tata cara manajemen seperti yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwick yaitu prinsip-prinsip organisasi tentang tujuh prinsip organisasi yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting yang kemudian dapat disingkat dengan istilah POSDCORB seperti yang sering kita dengar dan pahami,

kritik dari paradigma ini adalah karena terlalu berfokus pada aspek Fokus bukan lokus sehingga lokus atau siapa pelaksananya menjadi kabur dan kurang jelas

c. Paradigma III administrasi negara sebagai politik (1950-1970)

Paradigma administrasi negara sebagai politik ini telah terjadi perbaikan-perbaikan terkait kritik-kritik pada paradigma sebelumnya yang menghasilkan pembaharuan pada lokus dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan namun meski telah ada kejelasan lokusnya administrasi negara malah kehilangan fokusnya. Terjadi kebingungan dikalangan pegawai di pemerintahan terkait dengan siapa yang harus mengerjakan apa dengan mekanisme yang kabur tidak seperti pada paradigma prinsip-prinsip administrasi negara pada masa ini memisahkan diri dari administrasi itu sendiri dan beku pada politik.

Akibatnya di Amerika pada masa 1950-1960 terjadi penurunan minat dari para civitas akademik maupun ilmuan yang berkecimpung dibidang administrasi negara karena mereka menganggap administrasi negara di Amerika kala itu terlalu fokus pada urusan birokrasi sebagai lokus. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dari Amerika yang menggunakan pendekatan praktis dan realistis artinya mempelajari ilmu yang benar-benar terlibat dengan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata sedangkan administrasi negara hanya berfokus dalam membangun teori, berusaha mencari data, fakta-fakta dan fenomena baru sebagai suatu bahan kajian untuk memperkuat perkembangan keilmuannya.

d. Paradigma IV administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Paradigma yang keempat ini terjadi disaat yang sama dengan paradigma politik tetapi paradigma ilmu administrasi kurang mendapatkan perhatian. Istilah ilmu merupakan frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu bidang pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang sejenis saling terkait dan memiliki fenomena untuk dikaji itulah yang disebut dengan ilmu. Ilmu administrasi membahas seputar fokus-fokus dari bidang administrasi itu sendiri, lokus dari administrasi tidak terlalu dibahas pada paradigma ini.

Fokus adalah pusat pembahasan paradigma ilmu administrasi karenanya administrasi mengajarkan teknik-teknik, metode-metode, spesialisasi, perniagaan, kelembagaan, dan pengembangan organisasi. Tokoh dari paradigma ini adalah Keith M. Henderson, James G. March, Herbert A. Simon. Jaes D. Thomson, March dan Richard Cyret. Beberapa tokoh mengatakan bahwa pengembangan organisasi memiliki nilai-nilai yang sangat cocok untuk diterapkan didalam Ilmu administrasi negara. Nilai – nilai demokrasi dan nilai nilai pengembangan kualitas individu merupakan isi dari bidang pengebangan organisasi hal inilah yang membuat para muda-mudi menumbuhkan ketertarikkannya pada ilmu administrasi, mereka memandang bahwa kebebasan untuk berdemokrasi dan pengembangan diri adalah hal yang berprospek bagus di masa depan.

- e. Paradigma V administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara adalah paradigma yang masih dianut oleh beberapa tokoh hingga saat ini pada paradigma ini terjadi perdebatan antara fokus dan lokus yang seperti tidak pernah berakhir telah berhenti disini. Lokus dan fokus merupakan dua hal yang sangat berdampingan dan harus bisa disatukan bukan dipisahkan sehingga pada era ini fokus dari administrasi negara seperti teknik-teknik administrasi, kajian kebijakan, analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, implementasi, manajemen publik, sedangkan lokus yang cenderung berfokus pada pemerintahan, birokrasi dan lembaga-lembaga negara akhirnya dapat disatukan.

Tokoh yang berperan di dalam paradigma kelima ini adalah Herbert A. Simon. Mereka akhirnya bisa menyadari bahwa dengan menyatukan lokus dan fokus akan menghasilkan suatu sistem yang solid bagi pemerintah dalam memimpin masyarakat menggunakan pendekatan fokus yaitu melalui teknik-teknik, metode-metode untuk menghasilkan sebuah produk kebijakan. Pada paradigma administrasi negara pemerintah dan birokrasi sebagai pihak yang memiliki kuasa atas wewenang yang dimilikinya namun disisi lain pemerintah kurang berorientasi pada apa yang menjadi keresahan masyarakat (Anggara, 2016).

f. Paradigma Administrasi negara sebagai Good governance

Penelitian ini masuk kedalam paradigma good governance karena paradigma good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan good governance berdasarkan pada beberapa prinsip-prinsip yang terdiri dari partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas. Yang artinya administrasi negara harus memperhatikan aspek-aspek masyarakat, administrasi negara bertujuan untuk melayani masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat.

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara harus bisa dipertanggung jawabkan. Sistem dari good governance menekankan pada efisiensi dan efektifitas dalam proses yang berlangsung dan juga harus transparan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar mereka tahu dan bisa mengetahui tindakan-tindakan administrator sehingga kasus-kasus penyelewengan, penggelapan, Korupsi, kolusi, nepotisme dapat diminimalisir guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2017).

1.5.3 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan kata yang umum didengar di telinga kita. Kata kebijakan biasanya sangat identik dan erat kaitanya dengan politik atau pemerintah, kata kebijakan bersala dari bahasa Yunani dan bahasa latin yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris *policy*. Menurut Singadilaga dalam (Anggara, 2016:10) kebijakan publik merupakan suatu serangkaian

keputusan dan pilihan-pilihan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau publik..

Sebuah kebijakan biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang menempati posisi tertentu di kursi pemerintahan mereka ini memiliki pengaruh dan peran baik dalam hal merumuskan / formulasi kebijakan, membuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kontrol dan pengawasan, maupun evaluasi sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan akan muncul karena dilatarbelakangi oleh sebab-sebab khusus tertentu. Tidak semua permasalahan yang terjadi akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan untuk menemukan solusinya tetapi perlu juga dilakukan analisis analisis khusus di dalam lingkup pemerintah.

Pada dasarnya kebijakan publik didalamnya memuat pola-pola tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Arah kebijakan adalah berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu yang bersifat positif artinya kebijakan itu dibuat untuk menjadi solusi akan sebuah fenomena di masyarakat sehingga isi dari kebijakan biasanya adalah berupa produk nyata atau apa yang benar-benar akan diimplementasikan. Pedoman, petunjuk, tata cara, pegangan, usaha maupun setiap kegiatan pemerintah harus berdasar pada kebijakan karena kebijakaan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri untuk mempermudah dan memperlancar segala kegiatan yang dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan negara yang telah tertuang di UUD 1945.

Menurut William N. Dunn (Dunn, 1998). Proses kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan berupa penyusunan agenda, atau agenda setting,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan jika dijabarkan secara lengkap sebagai berikut,

a. Penyusunan agenda (Agenda setting)

Pada tahap awal dilakukan dengan mencari isu-isu permasalahan yang akan diangkat. Isu-isu tersebut harus merupakan isu publik atau merupakan permasalahan publik bukan masalah pribadi, perseorangan, kelompok maupun golongan tertentu, dari isu-isu yang telah diangkat selanjutnya dilakukan pemilihan isu berdasarkan prioritas. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan kriteria cakupan yaitu seberapa besar permasalahan ini terjadi apakah masyarakat di tingkat kabupaten atau kota saja ataukah seluruh provinsi atau bahkan nasional.

Kemudian seberapa besar dampak yang akan terjadi, menyangkut perasaan dan emosi dari orang banyak, permasalahan mengenai kekuasaan dan keabsahan yang menyangkut persoalan yang sulit untuk dijelaskan tetapi dapat dirasakan, telah mencapai kritis titik tertentu apabila tetap dibiarkan maka akan berdampak serius, telah mencapai tingkat tertentu di dalam sistem ekonomi-sosial, dan mendapatkan dukungan dari media massa. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyusun sebuah agenda harus dilakukan pengecekan ulang isu terkait urgensi, pemangku kepentingan yang terlibat serta esensi dari isu tersebut.

b. Formulasi kebijakan (policy formulating)

Isu yang telah dipilih berdasarkan kriteria tersebut selanjutnya akan di definisikan dan dianalisis untuk dicari cara pemecahan masalahnya bagaimana solusi yang akan diaplikasikan kedalam sebuah rumusan kebijakan yang

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Untuk masuk kedalam proses merumuskan kebijakan diperlukan opsi-opsi alternatif yang akan di seleksi terlebih dahulu untuk mencari alternatif mana yang terbaik dan paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c. Legitimasi kebijakan

Legitimasi sangat diperlukan sebelum penerapan kebijakan. Legitimasi termasuk sebuah praktek politik yang berkaitan erat dengan keabsahan dan legalitas dari tindakan yang dilakukan pemerintah oleh karena jika tidak ada proses legitimasi di dalam kebijakan maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada lembaga pembuat kebijakan dampaknya adalah lembaga pembuat kebijakan tidak mendapatkan dukungan penuh yang dapat mengganggu stabilitas dari pelaksanaan kebijakan itu kelak.

Legitimasi dapat menciptakan stabilitas politik, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Sebuah lembaga akan dapat bekerja dengan baik dalam membuat kebijakan dan mampu menerapkan kebijakan apabila terdapat legitimasi yang kuat. Para pemimpin atau birokrat biasanya akan berusaha mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap dirinya sebaliknya masyarakat akan memberikan kepercayaan dengan mengharapkan dampak atau sesuatu yang menguntungkan melalui produ kebijakan yang dihasilkan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa para pemimpin negara aau birokrat memang mendapatkan mandat dan amanat untuk memerintah menggunakan kekuasaanya yang berasal dari masyarakat jadi sudah semestinya para wakil rakyat ini

bertindak dengan kepentingan bersama dan demi kebermanfaatan khalayak umum.

d. Implementasi kebijakan (policy implementation)

Implementasi kebijakan tidak hanya berbicara mengenai pelaksanaan dari kumpulan alternatif yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan kepada masyarakat tetapi implementasi dapat dipandang sebagai sebuah proses yang perlu memperhatikan siapa sasaran yang dituju, bagaimana cara mengantisipasi resiko, mengatasi masalah konflik yang mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan pemahaman yang tepat dalam rangka mengantisipasi kegagalan.

Kasus kegagalan implementasi suatu kebijakan biasanya disebabkan oleh eksekutor pelaksana yang tidak memahami cara melaksanakan kebijakan, kurang mengenal subjek dan objek sasaran, keterbatasan sumberdaya, dan koordinasi antar pihak-piha terkait yang lemah. Implementasi lebih bermakna apabila kita tidak hanya fokus pada pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan tetapi berusaha untuk lebih merasakan proses yang terjadi. Proses implementasi dapat mulai dilaksanakan apabila telah terlaksana fase fase sebelumnya seperti agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan serta telah ditetapkan tujuan kebijakan, program-program di dalamnya dan alokasi anggaran untuk proses implementasi kebijakan.

Implementasi adalah tahap yang berada ditengah-tengah dari sebuah kebijakan dimana implementasi akan dilaksanakan setelah keputusan atas pelaksanaan sebuah kebijakan disahkan dalam bentuk undang-undang maupun

dapat juga berbentuk sebuah intruksi pemerintah atau perintah yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk memecahkan permasalahan dengan isi perintah sasaran , tujuan dan teknis kebijakan secara jelas.

e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Evaluasi kebijakan tentu berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan pada saat sebuah kebijakan atau sebuah program sedang berjalan atau disebut dengan evaluasi *on going* atau dapat juga dilaksanakan pada saat kebijakan tersebut telah hampir selesai dilaksanakan. Perbedaan dari evaluasi saat program berjalan dengan evaluasi saat akhir pelaksanaan kebijakan sangat berbeda, tergantung pada lembaga pelaksana kebijakan tersebut. Namun seringkali evaluasi dilaksanakan pada saat kebijakan sedang berjalan hal ini karena proses evaluasi dipandang sebagai sebuah kegiatan fungsional.

Evaluasi berjalan dapat dimulai dari tahap paling awal ketika identifikasi permasalahan, perumusan masalah, mencari dan memilih alternatif kebijakan hingga pada saat proses implementasi kebijakan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penilaian sebuah kebijakan yang menyangkut substansi, ketepatan sasaran, respon sasaran, dan dampak serta akibat yang terjadi pada sasaran. Seorang evaluator harus dapat mencermati dan menganalisa aspek-aspek yang dapat dilakukan kritik dan perbaiki dengan tujuan agar peluang keberhasilan kebijakan/program dapat meningkat.

1.5.4 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan secara singkat dapat dipahami merupakan beragam tindakan atau cara-cara yang digunakan oleh seorang pakar, peneliti atau ahli teori kebijakan publik baik dilakukan secara berkelompok (kolektif) atau individu untuk menginterpretasikan, mendefinisikan, menetapkan strategi, dan memahami sebuah kebijakan yang kaitannya dengan pemahaman akan problematika suatu kebijakan tertentu.

Ada beberapa pakar yang memiliki pendapat mengenai analisis kebijakan menurut tokoh yang bernama Dror dalam (Wahab, 2015) di definisikan sebagai,

“an approach and methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex policy issues”,

yang berarti bahwa sebuah pendekatan atau metodologi yang digunakan untuk mendesain dan menemukan beberapa alternatif yang dikehendaki berkaitan dengan beberapa isu yang kompleks, sedangkan tokoh lainnya yaitu Kent dalam (Wahab, 2015) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan,

“... that kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study primary motivation is to produce well supported recommendation for action dealing with concrete political problems ...”,

Bila diterjemahkan memiliki arti sebuah studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan

rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan politik yang konkret.

Permasalahan sosial di dunia sangat luas dan sangat beraneka ragam. Berusaha memahami dan menganalisis permasalahan dari satu bidang saja membutuhkan banyak waktu dan usaha, belum lagi di dunia ini jarang atau bahkan tidak ada sebuah permasalahan yang hanya terkait satu bidang saja, setiap permasalahan biasanya akan menyangkut hubungan sebab akibat yang mengular antara satu hal dengan yang lainnya. Misalnya permasalahan kemiskinan tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu permasalahan ekonomi saja tetapi sangat mungkin karena faktor sosial seperti pendidikan yang rendah, pemukiman kumuh, menyebabkan kriminalitas dan lain hal sebagainya.

Analisis kebijakan itu bersifat heterogen. Seorang analisis kebijakan berusaha memahami dan menganalisa sebuah kebijakan menggunakan berbagai macam pendekatan, terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis kebijakan seperti, pendekatan proses, pendekatan logis-positivis, pendekatan, ekonometrik, pendekatan substantif, pendekatan fenomenologis (pasca positivis), pendekatan partisipatif, pendekatan normatif, pendekatan ideologis dan pendekatan historis.

Tabel 1.3 Jenis pendekatan analisis kebijakan

No	Jenis Pendekatan	Tujuan Utama
1	Pendekatan Proses	Mengamati bagian-bagian yang berkaitan dengan dari proses kebijakan dari awal hingga akhir
2	Pendekatan Substantif	Mengamati suatu area yang bersifat substantif di dalam kebijakan
3	Pendekatan Logis-Positivis	Menganalisis penyebab serta konsekuensi dari kebijakan menggunakan metode saintifik atau ilmu sains
4	Pendekatan Ekonometrik	Menganalisis teori-teori ekonomi dan mengkaji kecocokan efektivitas dan efisiensi teori-teori di dalam kebijakan tersebut
5	Pendekatan Fenomologis(Pasca Positivis)	Mengamati dan menganalisis fenomena fenomena yang ada dan hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya.
6	Pendekatan Partisipatif	Mengidentifikasi dan mengamati aktor-aktor yang terlibat didalam proses kebijakan
7	Pendekatan Normatif atau Preskriptiv	Menyarankan alternatif terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan
8	Pendekatan Ideologis	Mengidentifikasi dan menganalisis ide, pola pikir dari kebijakan tersebut dengan sudut pandang sosialis, liberal, kapitalis,
9	Pendekatan Historis	Mengamati perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu dan memberi alternatif saran berdasarkan

		pengalaman keberhasilan kebijakan serupa di era yang berbeda.
--	--	---

Sumber: (Wahab, 2015)

1.5.5 Konsep Peran

Pembahasan mengenai suatu program atau kebijakan tidak akan pernah lepas dari konsep peran. Setiap individu atau kelompok yang terlibat pasti memiliki peran dapat dikatakan demikian karena bersumber dari tindakan dan perilaku dari individu atau kelompok yang pasti memiliki suatu dampak di dalam suatu program atau kebijakan. Peran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *role* merupakan pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam strata sosial di masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat dapat melakukan sebuah perubahan positif bagi lingkungan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas – tugas yang dimilikinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Wulandari, 2013).

Menurut pendapat tokoh lainnya, teori peran (*role theory*) memiliki keterkaitan antara teori sosiologi, psikologi, antropologi dengan disiplin ilmu lainnya. Menurut Linton dalam (Hutami, 2015) menurutnya teori peran menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan budaya yang telah ada, harapan muncul sebagai akibat adanya peran dan tindakan yang dilakukan aktor juga berusaha untuk mewujudkan sebuah harapan. Misalnya seorang Guru memiliki peran untuk memberi ilmu kepada murid-muridnya karena itulah seorang Guru bertindak dengan cara mengajari murid-

muridnya ilmu-ilmu di dalam kelas, kemudian seorang Apoteker memiliki peran untuk memberi obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien maka seorang Apoteker bertindak meracik obat-obatan yang tepat sesuai rekomendasi resep dari dokter sebelum diberikan kepada pasien.

Soekanto dalam (Wulandari, 2013) menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang berupa pola perilaku atau tindakan yang dilakukan pada suatu peristiwa tertentu. Istilah peran diambil dari istilah yang berkembang dalam sebuah theater atau pertunjukkan dimana terdapat banyak pelaku yang memiliki posisi dan kedudukan tertentu, mereka memiliki bagian masing-masing yang berbeda antara pemeran satu dengan yang lainnya tetapi mereka menjalankan cerita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki untuk membangun cerita yang runtut, dinamis dan harmonis dalam rangka mencapai ending cerita yang diharapkan.

Jadi konsep peran ini dapat disederhanakan menjadi perilaku seseorang yang menempati posisi atau kedudukan tertentu yang dia bertindak atas dasar harapan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Ada dua jenis harapan yang diberikan terhadap peran seseorang, pertama *role perception*, cara pandang seseorang dalam memahami peran tertentu maksudnya adalah persepsi seseorang terhadap tindakan/cara bertindak yang dilakukan seseorang dengan kedudukan tertentu. Yang kedua *role expectations*, harapan seseorang terhadap perilaku seseorang lainnya di situasi tertentu.

Biddle dan Thomas dalam (Syahri, 2018) kemudian mengklasifikasikan teori peran menjadi beberapa golongan yaitu a) kedudukan orang dan perilaku mereka, b) perilaku yang muncul atas interaksi satu sama lain, c) orang-orang individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi sosial, d) hubungan keterkaitan antara orang-orang dengan perilaku. Kemudian menurut Scott dalam (Syahri, 2018) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipahami di dalam teori peran sebagai berikut,

- a. Peran bersifat impersonal, peran tidak dipengaruhi oleh individu tetapi peran telah memiliki fungsi dan kedudukan sesuai harapan.
- b. Peran dipelajari dengan cukup mudah, dengan belajar maka akan berefek pada perubahan pola perilaku individu
- c. Peran cenderung cukup sulit untuk dikendalikan
- d. Peran berkaitan dengan perilaku kerja, artinya tindakan dan pola perilaku yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diharapkan
- e. Peran dan pekerjaan berbeda, seseorang individu yang memiliki satu pekerjaan bisa memiliki lebih dari satu peran.

1.5.6 Konsep Stakeholder

Para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang penting demi kelangsungan sebuah organisasi atau lembaga. Para pemangku kepentingan biasanya disebut dengan istilah *stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari 2 kata yaitu kata *stake* dan *holder*. Secara garis besar istilah *stakeholder* memiliki makna sebagai seorang individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dan memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi atau dipengaruhi di dalam sebuah lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. *Stakeholder* biasanya memiliki hubungan keterkaitan dan kemampuan untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi baik dalam lingkup internal atau eksternal.

Menurut pendapat lain *Stakeholder* dapat dipengaruhi oleh hal-hal lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil dampak positif maupun negatif karena mereka memiliki kepentingan tertentu. Selanjutnya stakeholder dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *stakeholder internal* dan *stakeholder* eksternal, jika *stakeholder internal* adalah mereka yang merupakan bagian dari suatu organisasi memiliki kepentingan di dalam organisasi dan mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk mempengaruhi keputusan organisasi secara langsung, sedangkan jika *stakeholder eksternal* adalah mereka yang berasal dari luar organisasi tertentu, memiliki kepentingan, terlibat secara tidak langsung namun tetap memiliki pengaruh dari luar organisasi.

Stakeholders biasanya memiliki kepentingan terkait dengan pencapaian suatu tujuan tertentu mereka memiliki karakteristik memiliki keputusan sendiri, memiliki legitimasi dan kepentingan tertentu terhadap sebuah program. Dapat dicontohkan misalnya terdapat sebuah permasalahan lingkungan di daerah A tentunya beberapa orang dan organisasi tertentu memiliki kepekaan untuk menemukan solusi kemudian akhirnya pemerintah lokal setempat mencetuskan program lingkungan untuk mengatasi masalah terkait, kemudian muncullah *stakeholders* ini yang memiliki peranan masing-masing, memiliki keputusan dan

kepentingan masing-masing tetapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

1.5.7 Peran Stakeholder

Setiap hal yang diciptakan di dunia ini pasti memiliki peran masing-masing seperti tanaman yang berperan menghasilkan oksigen dan menjadi sumber vitamin, hewan yang berperan untuk mengisi dan menjaga ekosistem, air yang memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan dan hewan, begitu pula manusia yang memiliki peran-peran yang kompleks dalam kehidupan.

Kehidupan manusia dapat diibaratkan dengan teater perwayangan dimana ada seorang dalang/pemain utama atau sebagai lakon yang bertanggung jawab besar dalam kisah, adapula sinden sebagai pemeran pendukung mengisi pertunjukan dengan nyanyian khas, pemusik sebagai pendukung acara dengan sajian musik, dan penonton yang menikmati pertunjukan sebagai khalayak sasaran. Melalui contoh tersebut artinya kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari sebuah 'peran'. Menurut *Maryono* dalam (Nugroho, 2019) terdapat tiga jenis *stakeholder* yaitu,

- a. *Stakeholder primer* yaitu *stakeholder* yang menerima dampak langsung dari suatu rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif, *stakeholder* ini biasanya banyak terlibat di dalam proses awal hingga akhir sebuah kegiatan
- b. *Stakeholder kunci* yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam

sebuah organisasi atau kegiatan karenanya merekalah yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan secara penuh

- c. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholder* pendukung biasanya mereka tidak terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena mereka tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi mereka memiliki peran dalam mendukung dan memberi saran / masukan terhadap sebuah program.

Berkaitan dengan klasifikasi selanjutnya apabila dianalisis menurut tingkat kepentingan dan pengaruh seorang tokoh bernama *Gardener et al.*, dalam (Nugroho, 2019) mengklasifikasikan beberapa *stakeholder* sebagai berikut,

- a. Subyek (*Subject*) merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi akan tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain kunci (*key player*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi serta memiliki pengaruh yang tinggi pula.
- c. Pengikut (*Crowd*) adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah serta kepentingan yang rendah juga.
- d. Pendukung (*contest setter*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Menurut pendapat dari tokoh lainya mengenai peran *stakeholder* salahsatunya adalah pendapat dari Nugroho(2014) dalam (Zuhri, Haryono, & Anggraeni, 2015) sebagai berikut,

- a. *Policy Creator* adalah *stakeholder* yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan penentu dalam kebijakan tertentu.
- b. Koordinator adalah *stakeholder* yang berperan untuk mengkoordinasikan program kepada pemangku kepentingan lainya yang terlibat.
- c. Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi kepentingan pemangku kepentingan lainya terhadap sebuah program secara fisik maupun non fisik.
- d. Implementor adalah *stakeholder* yang memiliki tugas sebagai bagian pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan kebijakan / keputusan yang telah ditentukan kepada kelompok sasaran.
- e. Akselelator adalah *stakeholder* yang berperan untuk mendukung pelaksanaan program agar dapat efektif dan efisien sehingga dapat tercapai sesuai dengan target serta tujuan yang telah diharapkan.

1.5.8 Analisis *Stakeholders*

Analisis *stakeholder* adalah sebuah proses memetakan posisi *stakeholder* terhadap kegiatan yang akan dijalankan atau dirancang oleh organisasi publik, melakukan analisis *stakeholder* sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui siapa-siapa saja atau pihak mana saja yang akan bekerja sama dalam mewujudkan sebuah tujuan kebijakan atau program. Berikut beberapa manfaat analisis *stakeholder* menurut *Wisnubroto*,

- 1) Meningkatkan keberhasilan program
- 2) Meminimalisir berbagai risiko yang akan dihadapi seperti, penolakan terhadap program atau perubahan

- 3) Menjembatani modal sosial yang dapat berperan positif
- 4) Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan perubahan
- 5) Memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait sasaran, potensi dan tantangan program.

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis *stakeholder* adalah model Diagram Venn yaitu diagram yang menunjukkan semua kemungkinan yang berhubungan dengan logika rasional dan hipotesis. Metode lain yang digunakan dalam analisis *stakeholder* diantara *stakeholders* individu atau kelompok menurut Grimble dan Wellard dalam (Aisyah, Yusuf, & Lawelle, 2017) adalah PI (Power dan Interest) yang membagi menjadi empat kategori diantaranya sebagai berikut,

- a. Kategori Power tinggi dan interest tinggi (dominan), yaitu pemangku kepentingan dengan power yang sangat kuat yaitu berpengaruh sebagai key player atau aktor kunci dalam sebuah program serta memiliki kepentingan yang dominan.
- b. Kategori Power tinggi dan interest rendah (contest setter), yaitu stakeholder dengan pengaruh yang tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah, stakeholder ini biasanya menjadi pendukung program.
- c. Kategori interest tinggi dan power rendah, yaitu stakeholder dengan kepentingan tinggi dan pengaruh yang rendah.
- d. Kategori interest rendah dan power rendah yaitu pihak yang tidak memiliki tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki pengaruh pada sebuah program sehingga hanya menjadi pengikut.

1.5.9 Definisi dan Penggolongan Sampah

Sampah adalah suatu bahan buangan yang baik organik maupun anorganik yang telah dianggap tidak memiliki nilai guna lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun dapat juga berasal dari proses alami. Sampah pada umumnya memiliki bentuk cair, padat maupun setengah padat, ada sampah yang bisa cepat terurai dengan organisme alami seperti sampah organik (sampah sisa makanan, buah, sayur,) dan ada juga sampah yang sulit untuk terurai seperti sampah anorganik (plastik, karet, besi,) sampah-sampah inilah yang diperlukan penanganan khusus agar tidak berpotensi mencemari lingkungan. Memang sampah ini dianggap barang buangan hasil sisa aktivitas manusia yang sudah tidak bernilai dan tidak berguna akan tetapi, tidak semua sampah itu tidak berguna ada juga beberapa jenis sampah yang masih dapat didaur ulang menjadi barang lain yang bernilai ekonomis. Banyak jenis-jenis, macam-macam, penggolongan sampah sehingga perlu kita memahami secara mendalam mengenai sampah. Secara lebih mendetail secara garis besar sampah digolongkan menjadi 3 jenis yaitu,

- a. Sampah organik biasanya sering disebut juga sampah basah adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan berupa sampah sisa makanan daging, ikan, daun kering, batang pohon, sisa sayuran, sisa buah, sisa nasi. Sampah jenis ini adalah sampah yang dapat terurai dengan cara membusuk dengan sendirinya dalam

waktu yang singkat dan juga biasanya dapat dengan mudah diurai oleh organisme pengurai seperti jamur, cacing, ulat melalui proses pembusukan.

- b. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang bersifat kimiawi atau benda yang telah melalui serangkaian proses kimia sehingga sulit atau tidak dapat terurai dengan mudah secara alami seperti plastik, kaca, karet, besi, logam, serat baja.
- c. Sampah berbahaya merupakan sampah yang memiliki dampak yang buruk berbahaya bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan sampah jenis ini diantaranya adalah 1)Sampah Beracun, yaitu sampah sisa racun tikus, insektisida, pestisida, 2)Sampah pantogen, yaitu sampah sisa peralatan rumah sakit seperti jarum suntik, obat-obatan, jarum infus, perban operasi, 3)Sampah ledakan yaitu sampah sisa ranjau, bubuk mesiu, denator, peluru, 4)Sampah radioaktif yaitu sampah-sampah sisa pengolahan bahan radiokatif, sampah nuklir. Sampah-sampah berbahaya ini memerlukan penanganan khusus agar meminimalisir bahaya yang ditimbulkan bagi makhluk hidup dan lingkungan.

Jika dilihat berdasarkan sumber sampah seorang tokoh bernama (Thensen & Vigil) mengklasifikasikan sumber sampah seperti dibawah ini,

- a. Sampah alam merupakan sampah yang berifat organik dan berasal dari proses alami dari lingkungan itu sendiri seperti sampah daun kering, batang/ranting pohon, kotoran hewan sampah-sampah ini sangat mudah untuk terurai dan menjadi bahan organik bercampur dengan tanah.

- b. Sampah manusia terdiri dari hasil keluaran dari proses alami tubuh manusia seperti air kencing dan kotoran manusia (feses), sampah ini berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat karena apabila tidak dikelola dengan benar sampah yang berasal dari manusia ini dapat menjadi sumber dari munculnya penyakit berupa bakteri-bakteri dan kuman yang berbahaya bagi tubuh manusia.
- c. Sampah perkantoran adalah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kantor seperti sampah-sampah kardus, kertas-kertas sisa lembar kerja, sampah tekstil, plastik dan sampah organik lainnya.
- d. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, sampah organik biasanya sangat mendominasi hasil sisa sampah rumah tangga dan sampah kertas atau plastik. Sampah rumah tangga harian setiap keluarga tentu berbeda-beda tergantung kepada tingkat pendapatan dan pola hidup.
- e. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari proses produksi barang di pabrik, sampah industri dibagi menjadi 2 yaitu sampah umum dan limbah padat dan cair, sampah umum seperti hasil sisa produksi kain, plastik, kardus, kertas dapat dengan mudah dikelola oleh pabrik dengan cara diangkut ke truk pengangkut sampah kemudian dibuang langsung ke TPA atau bagi barang yang masih memiliki nilai guna dapat juga dijual. Sedangkan untuk limbah padat dan cair diperlukan pengelolaan khusus tidak dapat sembarangan dibuang ke sungai atau TPA tetapi perlu diproses di fasilitas pengolahan limbah dengan tujuan untuk menetralkan zat-zat

kimia berbahaya sehingga mengurangi dampak pencemaran bagi lingkungan sekitar.

Digolongkan menurut bentuknya ada sampah padat dan juga sampah cair akan dijelaskan sebagai berikut,

- a) Sampah padat adalah sampah sisa buangan dengan bentuk padat dapat berupa sampah sisa seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah, daun kering, bangkai hewan, maupun sampah padat bersifat anorganik seperti sampah kaca, plastik, kertas, sampah kabel karet, kawat, potongan besi dan lain sebagainya. Sampah padat dapat dibagi menjadi 2 sampah, sampah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai. 1) sampah padat dapat terurai seperti sampah dapur, sampah sisa makanan, kotoran hewan, sisa buah . 2) sampah padat tidak dapat terurai tidak dapat terurai dengan sendirinya melalui proses biologi seperti plastik, kertas, kain, kapas tissue . Tetapi masih dapat di daur ulang, seperti kertas karbon, thermo coal, paper pack tidak dapat di daur ulang.
- b) Sampah cair biasanya adalah sampah limbah industri yang berasal dari sisa hasil produksi seperti limbah pewarna tekstil sisa pabrik pakaian / tekstil , limbah cair rumah pemotongan hewan. Limbah sisa kotoran manusia, limbah hasil pertambangan, limbah cair cucian pakaian dan bermacam-macam.

1.5.10 Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah setiap tindakan yang dilakukan mulai dari awal timbulnya sampah hingga sampai kepada tahap pemrosesan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir(TPA). Secara umum penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara a)pengurangan sampah dan b)penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pengurangan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan cara proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (PP RI NOMOR 81 TAHUN 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga, 2012).

Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang dari sumbernya, pengelola kawasan(pemukiman,komersial, kawasan industri dan fasilitas umum), dan pemerintah kabupaten/kota di setiap daerah. Proses pemilahan dilakukan dengan pengelompokan paling sedikit lima jenis sampah menurut (Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012, 2018) pasal 16 dan 17 yaitu,

- a) sampah 3B yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya, beracun
- b) sampah yang mudah terurai
- c) sampah yang dapat digunakan kembali
- d) sampah yang dapat didaur ulang dan,
- e) sampah lainnya.

Di dalam peraturan tersebut berbunyi bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara masyarakat melakukan pemilahan sampah di tempat masing-masing, pengelola kawasan juga melakukan pilah sampah dan menyediakan sarana pemilahan skala kawasan sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten/Kota. Sarana pemilahan yang dimaksud adalah TPS, TPS 3R, TPST , dan alat pengumpul untuk sampah terpilah harus sesuai dengan persyaratan jumlah sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi label atau tanda, bahan bentuk dan warna wadah diberi pembeda.

Menurut (Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012, 2018) TPS dan TPS 3R harus mengelompokkan minimal 5 jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan, lokasi mudah diakses, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal pengangkutan. Jika mengacu pada pasal 21 dijelaskan bahwa pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.

1.5.11 Kerangka Penelitian

Gambar 1.4 Kerangka Penelitian



1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan sebagian tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasionalisasi adalah menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasionalisasi yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah definisi operasionalisasi juga dapat pula dijadikan sebagai batasan pengertian yang berguna sebagai pedoman dalam suatu kegiatan penelitian.

Pentingnya operasionalisasi konsep adalah sebagai penjabar dari sebuah penelitian. Fungsinya menjelaskan bagaimana sebuah program dapat dijalankan secara sistematis dan terstruktur sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai serta sebagai pembatas dan pedoman bagi peneliti agar melakukan tindakan penelitian tetap pada zona yang telah di rencanakan tanpa keluar jalur.

Analisis peran stakeholder merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan pihak-pihak tertentu di dalam sebuah organisasi atau kelompok. Analisis peran *stakeholders* dalam Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon dapat dijabarkan dengan memperhatikan variabel sebagai berikut,

1.6.1 Peran *Stakeholder*, setelah melalui proses identifikasi pihak-pihak yang terlibat selanjutnya adalah melakukan klasifikasi peran-peran yang dimiliki oleh *stakeholders* tersebut,

- a) Berperan sebagai *Policy creator*, membuat dan mengambil keputusan

- b) Berperan sebagai Koordinator, mengkoordinasikan keputusan yang telah dibuat oleh *policy creator*
- c) Berperan sebagai Fasilitator, membantu mencukupi kebutuhan pihak-pihak sasaran yang akan mengeksekusi keputusan
- d) Berperan sebagai Implementor, pihak yang berperan mengeksekusi keputusan yang telah dibuat menjadi sebuah kegiatan nyata secara langsung
- e) Berperan sebagai Akselator, berperan dalam membantu mempercepat dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh pihak pelaksana kegiatan.

1.6.2 Faktor Penghambat bagi *stakeholders* dalam program pilah sampah di Kelurahan Mangkang kulon. Dalam pelaksanaan sebuah program pasti akan selalu ditemui hambatan-hambatan atau kendala. Hambatan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap *Stakeholder* dalam program pilah sampah. Faktor penghambat peran *Stakeholder* dalam program pilah sampah dapat dianalisis melalui variabel-variabel sebagai berikut,

- a) Komunikasi, dapat diukur dengan,
 - Kelancaran proses transmisi
 - Media yang digunakan
 - Kejelasan perintah
 - Ketepatan informasi
 - Konsistensi informasi
- b) Nilai, dapat diukur dengan,
 - Kebudayaan lokal

- Adat istiadat setempat
 - Kebudayaan luar yang dibawa pendatang
- c) Tingkat Kepercayaan
- Komitmen
 - Sikap
 - Hubungan timbal balik
- d) Sumber daya
- Ketersediaan sumberdaya manusia
 - Kemampuan sumberdaya manusia
 - Fasilitas sarana/prasarana

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada rasa keingintahuan penulis mengenai program pilah sampah yang berada di kelurahan Mangkang kulon yang telah berjalan cukup lama namun ternyata lingkungan di kelurahan Mangkang kulon tidak seluruhnya bersih, masih ada beberapa Rt/Rw yang lingkungannya masih terlihat kotor dan kumuh serta bencana banjir yang sering terjadi. Peneliti berpendapat bahwa terkait dengan hal tersebut tentu peran dari *stakeholders* program belum maksimal atau ada faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal.

Pengelolaan sampah di kelurahan Mangkang kulon dilaksanakan dengan kerjasama peran antara berbagai pihak internal dan eksternal dan Wilayah

Mangkang kulon masih ditemui sampah dan kumuh serta bencana banjir sering terjadi di wilayah Mangkang kulon, menurut DPU Kota Semarang(2018) banjir disebabkan oleh permasalahan sampah sehingga muncul sebuah pertanyaan yaitu **‘Mengapa peran stakeholder pilah sampah belum maksimal?’**.

Berdasarkan *Reasearch question* tersebut peneliti berusaha mencari tahu dengan membuat cabang permasalahan yang lebih spesifik yaitu, analisis peran stakeholder, dan faktor penghambat. Diharapkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tersebut dapat menjawab permasalahan mengenai peran stakeholder yang belum maksimal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis- Jenis penelitian menurut (Wahidmurni, 2017),

- a) Penelitian Eksploratif adalah penelitian yang berusaha menggali mengenai suatu permasalahan atau fenomena tertentu secara lebih mendalam dan menyeluruh dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta baru yang berguna untuk memperdalam detail kajian akan suatu fenomena dalam rangka menemukan jawaban untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi.
- b) Penelitian Deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan gejala-gejala penelitian menggunakan kalimat-kalimat, simbol dan gambar yang lebih dari sekedar angka-angka atau jumlah frekuensi dalam penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif berguna

menjelaskan gambaran fenomena penelitian secara menyeluruh terkait hubungan-hubungan yang terjadi, realitas jamak, multi perspektif . Hasil penelitian deskriptif dapat diperoleh melalui hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif yaitu lebih banyak menggunakan penjelasan berupa kalimat-kalimat dan simbol-simbol untuk menjelaskan gejala-gejala penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan observasi langsung ke lapangan serta eksploratif yaitu peneliti dalam hal ini berusaha menemukan fakta-fakta baru yang ada di lapangan, mengenal subjek yang diteliti secara mendalam, hubungan-hubungan yang terjalin dalam rangka untuk memperdalam kajian mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

1.8.2 Situs Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan tempat penelitian yang tepat untuk menghasilkan data yang akurat. Lokasi penelitian dapat ditentukan berdasarkan pada dimana fenomena yang ingin diteliti terjadi, dalam hal ini penelitian analisis peran *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang mengambil lokasi penelitian di kantor kelurahan Mangkang kulon, Rumah pilah sampah dan di kelurahan Mangkang kulon itu sendiri. Pemilihan ketiga lokasi tersebut karena berhubungan dengan *stakeholder* yang akan diteliti.

1.8.3 Subyek penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menjadi informan bagi peneliti dalam mencari tahu informasi lapangan yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan subjek / informan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Peneliti berusaha mencari informan baik individu atau kelompok yang benar-benar memahami program pilah sampah dan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan peran-nya. Subjek penelitian analisis peran *stakeholder* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang diantaranya adalah sebagai berikut,

- a) Kecamatan Tugu
- b) Kelurahan Mangkang kulon
- c) Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang
- d) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- e) Bank Sampah Karya Melati
- f) Pemerintah kota Semarang
- g) Masyarakat

1.8.4 Jenis Data

Menurut Ralston dan Reily dalam (Chamidi & Safrudin, 2004) data adalah sebuah fakta yang ditemukan melalui serangkaian proses observasi terhadap suatu fenomena tertentu, hasil dari kegiatan observasi secara langsung yang berupa fakta ini dapat dituangkan dalam bentuk kata-kata, angka, kalimat, gambar maupun simbol-simbol yang mewakili fenomena sosial yang terjadi. Data

digunakan untuk menyusun sebuah kumpulan fakta-fakta agar dapat menjadi sebuah informasi. Penelitian tentang Analisis Peran *Stakeholders* dalam Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang menggunakan jenis data sebagai berikut,

a) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara kepada narasumber, analisis dokumen, Focus Group Discussion (FGD), hasil pengamatan langsung (observasi), dan sebagainya. Data ini berupa fakta-fakta yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, simbol-simbol yang mewakili suatu fenomena tertentu.

b) Data Kuantitatif

Jika data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif digunakan dalam menyusun statistik, perhitungan matematis. Data ini terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, data nominal, ordinal, interval, rasio, kuantum dan diskrit.

Setelah mengetahui jenis-jenis data yang ada peneliti memilih memakai kedua jenis data tersebut agar saling melengkapi di dalam penelitian analisis peran *stakeholder* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang tetapi dalam penyajiannya akan lebih dominan ditemukan data kualitatif yang berupa kalimat-kalimat, simbol dan gambar karena penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data- data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau hasil dari pengamatan langsung/observasi, Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.
2. Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan dituangkan dalam bentuk berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber- sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan buku, internet dan dokumen-dokumen yang mendukung

1.8.5 Sumber Data

Menurut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016) sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder akan dijabarkan sebagai berikut,

- a) Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui hasil pengamatan (observasi langsung) dan wawancara kepada informan yang kemudian dilakukan pencatatan dan/atau direkam oleh peneliti.
- b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi peneliti tidak perlu mengelompokkan dan menyusun kembali data karena biasanya data sekunder yang diperoleh melalui tulisan dari buku, dokumen, arsip dan data dari internet telah siap pakai artinya data yang

disajikan sudah melalui proses pengolahan oleh penulis buku/arsip sehingga mudah untuk digunakan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan kedua jenis data tersebut primer dan sekunder untuk melengkapi penelitian analisis peran *stakeholders* dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, (Wahidmurni, 2017)

- a) Observasi, melalui teknik ini peneliti berusaha menemukan fakta-fakta dengan cara pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui observasi peneliti tidak hanya berusaha mencari fakta lapangan akan tetapi peneliti juga berusaha memahami hubungan-hubungan, pola perilaku dan aktivitas alami dari subjek yang diteliti menarik kesimpulan berdasar apa yang terjadi kemudian melakukan pencatatan. Selain itu instrumen lain dari observasi berupa gambar, arsip-arsip, dokumen resmi yang berasal dari kantor kelurahan.
- b) Wawancara adalah teknik memperoleh informasi dari informan dengan cara komunikasi dua arah (tanya jawab) dengan informan / narasumber secara langsung maupun melalui media elektronik seperti video call, skype, telfon, . Teknik wawancara ada bermacam-macam, wawancara terpimpin, ter-struktur, tidak ter-struktur, individual, kelompok, wawancaar bebas. Secara umum wawancara yang sering digunakan adalah

wawancara ter-struktur dengan pertanyaan baku yang telah disusun sebelumnya dan wawancara tidak ter-struktur dengan catatan kecil mengenai haluan dan garis besar pertanyaan kemudian pewawancara melakukan improvisasi untuk memperdalam informasi yang ingin di ketahui dari informan sehingga tidak ada batasan dalam menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan peneliti.

- c) Dokumentasi melalui metode ini peneliti menggunakan catatan peristiwa yang berupa gambar-gambar atau tulisan berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen, file-file resmi dari kelurahan Mangkang kulon.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Priandangningtyas, Ying, & Febrina, 2013) analisis data adalah proses menyusun, mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen acak secara sistematis menjadi padu hingga lebih mudah dipahami dan dimengerti. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mengelompokkan kedalam unit-unit, menyusun pola. Analisis data kualitatif biasanya bersifat induktif yaitu melakukan analisa dari data-data yang diperoleh kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu untuk membentuk hipotesis penelitian. Ada tiga langkah analisis data kualitatif sebagai berikut,

- a) Reduksi data

Reduksi data merupakan cara yang digunakan untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, menyeleksi data yang tidak perlu serta mengorganisir

data menjadi ringkas dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumen dikumpulkan menjadi satu pada tahap ini data-data tersebut masih berupa data mentah yang acak fungsi reduksi data adalah agar data dapat dikelompokkan sesuai dengan unit-unit nya sehingga lebih mudah untuk dipahami pembaca.

b) Menyajikan data

Setelah proses reduksi data, data-data setengah jadi yang telah digolongkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis data dapat disajikan dalam bentuk chart, gambar, tabel-tabel, grafik, pie chart, kolom, bar, . Dengan menampilkan data melalui bentuk-bentuk tersebut maka akan semakin memudahkan bagi pembaca/peneliti untuk memahami data tersebut. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan cara menuliskan uraian-uraian, bagan-bagan, sehingga terbentuk pola-pola dan hubungan antara data yang membentuk sebuah informasi tertentu.

c) Verifikasi data

Diperlukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data dalam tahap ke-tiga ini. Peneliti membuat kesimpulan sementara dengan bahan data-data yang telah disajikan dan dapat berubah seiring dengan adanya data-data baru yang bisa saja memperkuat atau melemahkan kesimpulan awal peneliti. Jika ternyata ditemukan fakta baru dari data-data baru yang terkumpul maka kesimpulan sementara dapat berubah sesuai dengan data-data yang valid dan kredibel. Penarikan kesimpulan

sementara diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan fenomena penelitian.

Mengintrepretasikan data dapat dilakukan dengan cara menghubungkan hasil analisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumen / arsip resmi dengan teori-teori penelitian, kemudian hubungkan dan lakukan tinjauan permasalahan dengan teori apakah relevan atau tidak, memperluas hasil analisis dengan melakukan perbandingan antar hasil analisis dan analisis penyebab serta implikasinya, kaitkan dengan pengalaman saat terjun ke lapangan, lakukan dengan kritis dan detail.

1.8.8 Kualitas Data

Triangulasi data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar valid melalui berbagai sudut pandang sehingga menghindarkan dari bias. Peneliti menjadi sebuah instrumen dalam penelitian kualitatif karena hasil dari penelitian sangat ditentukan dari kualitas peneliti tersebut baik dari segi, kepekaan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam mencari dan mengolah data agar tidak dipandang sebagai hasil subjektif dan terkesan tidak ilmiah perlu dilakukan pengujian melalui metode triangulasi untuk membuktikan kredibilitas data. Triangulasi dibagi menjadi empat, (Raharjo, 2010)

- a) Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda-beda, misalnya suatu fenomena diuji melalui metode wawancara, observasi, angket, dokumentasi, penelitian

historis, mencari informan yang berbeda melalui perspektif yang berbeda untuk membuktikan keabsahannya.

- b) Triangulasi antar peneliti, dilakukan dengan cara membandingkan teknik analisis data antara satu peneliti dengan peneliti lainnya untuk memperluas perspektif terkait sebuah fenomena yang diteliti
- c) Triangulasi sumber data, metode ini hampir sama dengan triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan subjek atau metode yang berbeda-beda untuk melihat perbandingan kemiripan atau perbedaannya dengan begitu dapat diketahui kredibilitas data yang diperoleh.
- d) Triangulasi teori, dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teori untuk meneliti sebuah fenomena sehingga dapat dilakukan perbandingan antara teori satu dengan teori yang lainnya.